



PERAN DAN KONSEKUENSI KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI SYARIAH

Riska Noviana

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Ertanti Ardian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

David Verdyansyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Renny Oktafia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

***Abstract.** Monetary policy is one of the crucial instruments in regulating the economy of a country. In conventional economics, monetary policy is implemented through mechanisms such as interest rates and open market operations. However, in Sharia-compliant economies, which are based on the prohibition of riba (interest), monetary policy must be executed using instruments that adhere to Sharia principles. This study adopts a literature review methodology, thus focusing on bibliographic materials by seeking relevant literature. The theoretical data utilized in this research is obtained from library literature and analyzed based on various references in this paper. By understanding the role and consequences of monetary policy in Sharia economics, it is hoped that new insights can be provided for the development and implementation of monetary policies that align with Sharia principles.*

***Keywords:** Monetary, Sharia Economics, Role*

Abstrak. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter dijalankan melalui mekanisme suku bunga dan operasi pasar terbuka. Namun, dalam ekonomi syariah yang berprinsip pada larangan riba (bunga), kebijakan moneter harus dilaksanakan dengan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan, sehingga fokus penelitiannya adalah bahan pustaka dengan mencari literatur yang relevan. Data teoritis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur perpustakaan dan dianalisis berdasarkan berbagai referensi makalah ini. Dengan memahami peran dan konsekuensi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan penerapan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Moneter, Ekonomi Syariah, Peran

LATAR BELAKANG

Secara makro, segala peraturan syariah yang ada hubungannya Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai individu dan sebagai orang yang berada dalam masyarakat dari perspektif ekonomi. Islam mengaitkan upaya mencapai kebahagiaan manusia dengan kewajiban sosial, bukan mengisolasinya. Islam menempatkan penekanan yang sama pada kebutuhan masyarakat dan manusia. Islam mempertimbangkan kepentingan individu ketika mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat ketika mengatur kepentingan individu. Oleh karena itu, agar program pemerintah sesuai dengan prinsip syariah, kedua hal tersebut harus diprioritaskan.

Dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar di seluruh perekonomian, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga keadaan makroekonomi pada tingkat yang sesuai. Kebijakan moneter memiliki fungsi penting dalam ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas mata uang dan membatasi hubungan antara penawaran dan permintaan uang. Tujuannya adalah untuk mencapai ekspansi ekonomi yang cepat, distribusi pendapatan yang adil, dan pengelolaan volatilitas ekonomi, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran eksternal.

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip Islam. Salah satu komponen penting ekonomi Islam adalah kebijakan moneter. Jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian dikendalikan oleh kebijakan moneter. Dalam perekonomian tradisional, bank sentral menggunakan berbagai alat kebijakan moneter, seperti menetapkan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan menentukan cadangan minimum bank. Namun, dalam ekonomi syariah tidak mengenal sistem bunga sehingga instrumen-instrumen tersebut harus disesuaikan.

Ide-ide ekonomi Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan kebijakan moneter Islam. Larangan riba adalah salah satu prinsip mendasar atau bunga, mendorong pengembangan alternatif seperti prinsip bagi hasil atau sewa. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mendorong distribusi keadilan, dan menghindari fluktuasi yang merugikan masyarakat. Pendekatan ini menekankan instrumen konkret untuk peredaran uang yang lebih akurat dan berkelanjutan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam implementasinya, Kebijakan

moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun kebijakan ini berbeda-beda tergantung pada lingkungan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan, sehingga fokus penelitiannya adalah bahan pustaka dengan mencari literatur yang relevan. Data teoritis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur perpustakaan dan dianalisis berdasarkan berbagai referensi makalah ini. Untuk memahami dan menunjukkan keterkaitan antara kebijakan moneter dengan lembaga perbankan sebagai otoritas kebijakan moneter, penulis menerapkan metode literatur ini. Penulis berupaya mengategorikan dan mengevaluasi data tekstual dengan menggunakan sumber primer dan sekunder dengan mencari teks dari bahan pustaka yang relevan dan bahan pendukung lainnya berupa bahan pustaka yang relevan terkait dengan fokus artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN MONETER

Tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan variabel keuangan seperti kredit, jumlah uang beredar, dan suku bunga untuk memenuhi tujuan ekonomi tertentu dikenal sebagai kebijakan moneter. Undang-Undang Perbankan di Indonesia telah banyak melakukan revisi terhadap kebijakan ini dalam upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah, serta stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar mata uang. mengatur jumlah uang yang digunakan bertujuan untuk mengontrol inflasi, stabilitas ekonomi, harga, neraca pembayaran, dan penciptaan lapangan kerja baru, dengan dampak yang dirasakan oleh perbankan hingga sektor riil.

Tingkat suku bunga memiliki dampak besar terhadap permintaan barang dan jasa serta investasi, yang dapat merangsang atau menurunkan aktivitas ekonomi secara signifikan. Stabilitas ekonomi mencerminkan keadaan ekonomi yang terkendali, sesuai dengan harapan, dan berkelanjutan. Kebijakan moneter diperlukan saat terjadi ketidakstabilan harga yang notabene terjadi karena tidak seimbangnya antara nilai *supply and demand*. Fluktuasi yang tidak teratur bisa memengaruhi aktivitas ekonomi Masyarakat luas. Dalam konteks yang berbeda, kecenderungan investor untuk melakukan investasi di sektor riil dipengaruhi oleh proporsi uang, produk, dan jasa.

Prospek kerja yang lebih luas dan terdiversifikasi dapat dihasilkan dari investasi ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah peluang kerja.

Penguatan UMKM merupakan salah satu upaya menstabilkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan dua cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara. Karena dalam hal ini tujuan dari dilaksanakannya kebijakan Kebijakan moneter Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan nilai rupiah. Dari peranan UMKM ini perputaran uang dapat terlaksana dengan melakukan transaksi uang yang cepat dan efisien.

FUNGSI UANG DALAM KEBIJAKAN MONETER

Dalam sejarah, uang digunakan untuk memudahkan pertukaran barang dan mengurangi potensi perbedaan nilai barang yang ditukar. Penggunaan uang tidak hanya efisien, tetapi juga menjadi tolak ukur *value* sebuah barang yang paling tepat dalam pasaran. Penggunaan uang ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat efisien dalam sejarah peradaban manusia untuk mengurangi riba yang sudah ada sejak lama dan untuk membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien dengan cara yang sederhana. Dalam sistem keuangan modern, uang dikeluarkan oleh Satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan mencetak uang suatu negara adalah bank sentral.

Pihak di Indonesia yang dapat mengeluarkan uang logam dan uang kertas adalah Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Bank Sentral Tahun 1968. Menghilangkan potensi munculnya banyak penerbit dan penerbitan mata uang palsu yang menghambat perdagangan adalah tanggung jawab organisasi yang satu ini. Ada beberapa bentuk nilai moneter yang mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhi keinginan akan uang, seperti berikut ini:

1. Nilai intrinsik uang adalah nilai yang terkandung di dalam uang itu sendiri, yang dapat berdiri sendiri. Ini mencakup semua aspek uang, dari nilai nominal hingga bahan baku pembuatannya, yang bisa berupa logam atau kertas. Contohnya, uang dengan nilai nominal Rp 10.000 memiliki nilai intrinsik sebesar Rp 10.000.

2. Nilai ekstrinsik uang adalah nilai yang dilihat dari hubungannya dengan hal atau benda lain. Sebagai contoh, uang senilai Rp 10.000 bisa digunakan untuk membeli 2 porsi soto sehingga hal ini merupakan nilai ekstrinsik dari uang tersebut. Manfaat nilai uang antara lain adalah sebagai penunjuk harga, alat pembayaran, fasilitas transaksi jual beli, dan bentuk kekayaan riil.

Nilai sebenarnya dari uang ialah kemampuannya untuk ditukar dengan barang dan jasa. Contohnya, 10 tahun yang lalu Anda bisa membeli Sepatu senilai Rp 5.000, namun sekarang tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa nilai sebenarnya dari Rp 5.000 telah menurun, tetapi nilai nominal dari mata uang tersebut tetap sama. Nilai riil dari uang tersebut mengikuti permintaan dari supply and demand terhadap barang dan jasa yang cenderung mengalami perubahan dalam setiap dinamika ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor seperti inflasi dan kelangkaan faktor produksi.

Dalam era modern, mata uang digunakan dalam mayoritas kegiatan transaksi keuangan, perdagangan, dan lainnya karena efisiensi dan nilai uang yang dijamin oleh pemerintah dan diakui oleh pemerintahan lainnya. Bank sentral memiliki otoritas untuk mengendalikan besaran moneter, termasuk penerbitan uang, pengendalian uang beredar, uang primer, dan suku bunga, untuk mencapai tujuan ekonomi makro.

KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Kebijakan moneter syariah selalu didasarkan pada kondisi aktual di sektor riil. Singkatnya, kebijakan moneter tidak lepas dari perubahan kondisi sektor ekonomi produktif. Sektor riil menentukan tingkat keseimbangan sektor moneter, namun bukan berarti perubahan di sektor riil disebabkan oleh sektor moneter. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada alokasi sumber daya untuk memaksimalkan produktivitas. Dalam kebijakan moneter Islam, permintaan uang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan investasi yang produktif. Permintaan mata uang yang didorong oleh spekulasi tidak akan berdampak pada perbaikan sektor riil. Spekulasi hanya menyebabkan misalokasi dana dan tidak efisiennya permintaan uang.

Islam meyakini efektivitas permintaan mata uang akan tercapai jika pemerintah selalu menjaga nilai tukar mata uang dan mencegah serta melarang transaksi mata uang dan peredaran mata uang palsu. Dalam sistem moneter bunga digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat, yang berbeda

dengan prinsip Islam yang tidak memperkenalkan suku bunga ke pasar. Kebijakan moneter syariah bertujuan menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar, dengan regulator. Kebijakan moneter dalam Islam mengelola mata uang berdasarkan nilai-nilai Islam, menciptakan ekonomi yang stabil.

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Berikut ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang memenuhi nilai-nilai prinsip bisnis yang sesuai syariah. Alat-alat ini memunculkan pendekatan alternatif terhadap sistem ekonomi tradisional, yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Reserve Ratio

Artinya, Persentase simpanan atau cadangan yang dimiliki nasabah yang wajib dikembalikan oleh bank sentral. Dengan meningkatkan rasio cadangan, bank sentral mampu mempertahankan tingkat uang yang stabil dalam perekonomian. Akibatnya, bank terpaksa menyimpan uang, sehingga menurunkan modal yang tersedia untuk investasi dan mengendalikan inflasi.

Penggunaan instrumen ini untuk mengendalikan peredaran uang dianggap sejalan dengan keadilan Islam, pemerataan, dan larangan bunga/riba. mengelola simpanan cadangan yang wajib dimiliki oleh bank, membimbing perekonomian untuk menjaga distribusi yang adil, menahan diri dari kegiatan kepentingan ilegal, dan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan melayani kebutuhan masyarakat. Rasio cadangan merupakan mekanisme kebijakan moneter dalam perekonomian Islam yang menjunjung tinggi norma Islam dalam mengendalikan aliran uang dan mencapai hasil perekonomian yang diinginkan.

2. Moras Suassion

Khususnya ketika perekonomian sedang mengalami depresi, kebijakan bank sentral meningkatkan permintaan kredit yang ditujukan kepada bank komersial dan pelaku moneter lainnya, sehingga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dampaknya adalah peningkatan jumlah pinjaman bank komersial, yang membawa uang ke dalam perekonomian. Langkah ini mempercepat aliran uang ke seluruh masyarakat dan mengurangi tekanan akibat kemerosotan ekonomi. Bujukan moral menunjukkan upaya bank sentral untuk mempengaruhi perilaku bank komersial dan mendorong kemajuan

ekonomi, meskipun hal tersebut tidak dapat ditegakkan secara hukum. Alat ini berkaitan dengan ajaran moral dan etika tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam ajaran Islam. Bahkan karena “persuasi moral” tidak dinyatakan secara eksplisit, namun prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keseimbangan, membantu mereka yang membutuhkan, mengamalkan masyarakat, dan melayani masyarakat disertakan.

3. Lending Ratio

Dalam ilmu ekonomi Islam, rasio pinjaman mengacu pada konsep Qardhul Hasan yang menyatakan bahwa pinjaman yang baik lebih penting daripada pinjaman yang macet. Qardhul Hasan adalah sebutan untuk jenis pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dalam ekonomi Islam. Sebenarnya rasio pinjaman menampilkan porsi uang yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah atau bank untuk memberikan pinjaman sesuai dengan pedoman Qardhul Hasan.

4. Refinance Ratio

Refinance ratio ialah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam membayar kembali pinjaman setelah melakukan proses refinancing. Ketika rasio refinance meningkat, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan tanpa bunga. Sebaliknya, jika rasio refinancing menurun, hal ini menandakan bank umum perlu berhati-hati karena insentif pemberian pinjaman tanpa bunga lebih rendah. Prinsip rasio refinancing menggambarkan pentingnya memperluas aksesibilitas pendanaan yang adil dan sesuai syariah untuk mendorong kesejahteraan dan kegiatan ekonomi bersama.

5. Profit Sharing Ratio

Rasio Bagi Hasil (PSR) adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana keuntungan dibagi di antara para mitra dalam suatu kemitraan. Rasio ini biasanya didasarkan pada kesepakatan antar mitra, yang dapat mencakup investasi masing-masing mitra, upaya yang diberikan, atau faktor lain yang disepakati. Dalam ekonomi Islam, menetapkan rasio bagi hasil (PSR) sebelum meluncurkan sebuah perusahaan sangat penting untuk menjamin alokasi pendapatan yang adil. bahaya yang dialami oleh para peserta. Bank sentral dapat menaikkan PSR untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian, yang akan menarik investor dan pemilik perusahaan untuk terlibat dalam lebih banyak modal ventura dan usaha bisnis.

6. Islamik Sukuk

Sukuk adalah instrumen keuangan Islam seperti obligasi, di mana investor membeli sukuk dan mendapatkan pembayaran secara teratur bergantung pada margin keuntungan tertentu. Mekanisme kebijakan Sukuk memberi pemerintah cara inovatif untuk mengelola jumlah uang yang beredar dalam perekonomian ketika terjadi inflasi. Pemerintah dapat mengumpulkan uang dari pasar dengan menerbitkan Sukuk tambahan ketika inflasi terjadi. Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar dan membantu menahan tekanan inflasi. Alih-alih menerima bunga, investor menerima sebagian pendapatan yang dihasilkan dari aset atau inisiatif yang didukung oleh sukuk.

Aturan syariah, seperti aturan yang melarang riba, spekulasi, dan investasi komersial, harus dipatuhi oleh sukuk syariah hal-hal yang dilarang dalam Islam (seperti perjudian dan alkohol). Sukuk sering kali diawasi oleh dewan syariah atau pakar syariah yang mengeluarkan fatwa, atau opini, tentang kepatuhan instrumen tersebut terhadap prinsip syariah, untuk memastikan kepatuhannya. Pasar global telah menyaksikan peningkatan popularitas sukuk syariah, khususnya di kalangan investor Muslim yang mencari opsi sesuai syariah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan instrumen atau alat kebijakan moneter yang ditinjau dari segi etika dan moral dapat dikaitkan dengan cita-cita prinsip syariah. Alat-alat ini dikembangkan untuk mengelola lingkungan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan seimbang yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Nilai-nilai Islam dapat memberikan manfaat besar dalam kebijakan moneter guna mencapai tujuan eskalasi ekonomi sekaligus sesuai dengan berlandaskan ekonomi syariah. Namun, hal ini juga terdapat berbagai tantangan, seperti persyaratan untuk memahami ekonomi Islam secara menyeluruh dan detailnya. Disarankan bahwa untuk mengatasi masalah ini, otoritas moneter harus diberikan rekomendasi praktis dan berguna untuk menetapkan kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Uraian panduan ini mungkin memberikan arahan yang berguna dalam mengatasi hambatan implementasi dan melaksanakan implementasi aktual dan berguna dari pendekatan kebijakan moneter yang mengandung prinsip keagamaan juga mendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 980–993. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368>
- Latifah, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Raden Intan Lampung, U., Letnan Kolonel Endro Suratmin, J. H., & Kota Bandar Lampung, S. (1851). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kebijakan Moneter Dalam Perpektif Islam*, 1–25.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 85–101. <https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012>
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 73-94.
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter berbasis prinsip-prinsip islam. *Justicia Islamica*, 10(1).
- Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 65-77.
- Anastasia, M., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Kerupuk Desa Tlasi Tulangan Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 431-444.
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>
- Ahmad Hassan, *Mata Uang Islam: Telaah komprehensif sistem Keuangan Islam*, (Jakarta Radja, 2004)
- Adiwarman, *Ekonomi Makro Islami*, 210